



Article Informations  
Corresponding Email:  
ratihfid@gmail.com

Received: 28/07/2025; Accepted:  
20/09/2025; Published: 15/10/2025

## **EFEKTIVITAS KERJA SAMA ANTARA JAPAN INTERNASIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) DAN PEMROV DKI JAKARTA DALAM PROYEK MRT TAHUN 2022- 2024**

**Ratih Fidya Oentari<sup>1)</sup>, Iing Nurdin<sup>2)</sup>, Anggun Dwi Panorama<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis efektivitas kerja sama antara Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan proyek MRT Jakarta Fase 2. Studi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sinergi antara aktor internasional dan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur strategis. Pendekatan yang digunakan adalah Neoliberalisme Institusionalisme dengan tiga indikator: penyediaan informasi, penjaminan komitmen, dan pengurangan biaya transaksi. Metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik studi kepustakaan, yang melibatkan analisis dokumen resmi, publikasi institusional, pemberitaan media, serta pernyataan pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama berlangsung relatif efektif. Mekanisme pertukaran informasi terstruktur melalui pertemuan rutin dan risalah bersama, dengan pembagian peran yang jelas dan dukungan forum koordinasi teknis antar lembaga. Kendala masih ditemukan dalam hal transparansi, khususnya terkait keterbatasan akses publik terhadap dokumen lokal. Secara keseluruhan, kerja sama ini mencerminkan efektivitas koordinasi institusional dalam proyek infrastruktur perkotaan dan menegaskan peran signifikan institusi internasional dalam mendukung tata kelola pembangunan lintas negara.

**Kata Kunci:** kerja sama internasional, JICA, MRT Jakarta, efektivitas koordinasi, pembangunan infrastruktur.

### **Abstract**

*This study analyzes the effectiveness of the cooperation between the Japan International Cooperation Agency (JICA) and the Provincial Government of DKI Jakarta in implementing Phase 2 of the Jakarta MRT project. The research is grounded in the importance of synergy between international actors and local governments in strategic infrastructure development. The study applies the neoliberal institutionalism approach, using three main indicators: providing information, making commitments credible, and reducing transaction costs. A descriptive qualitative method is employed, with data collected through literature review, including official documents, institutional publications, media reports, and statements from relevant officials. The findings indicate that the cooperation has been relatively effective. Structured information*

*exchange takes place through regular meetings and joint records, with clearly defined roles and the support of inter-agency coordination forums. However, challenges remain in transparency, particularly in the limited public access to documents from local institutions. Overall, this cooperation reflects effective institutional coordination in urban infrastructure projects and highlights the significant role of international institutions in supporting cross-border development governance.*

**Keywords:** *International Cooperation, JICA, Jakarta MRT, Institutional Effectiveness, Infrastructure Development*

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya interdependensi antarnegara, kerja sama internasional menjadi instrumen penting dalam menghadapi tantangan pembangunan, terutama di negara berkembang. Pembangunan infrastruktur publik, yang bersifat padat modal, kompleks secara teknis, dan menuntut kesinambungan jangka panjang, semakin sering menjadi medan kolaborasi antara aktor domestik dan institusi internasional. Pembangunan infrastruktur transportasi publik di perkotaan menjadi kebutuhan mendesak bagi kota-kota besar, khususnya Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Ketergantungan pada kendaraan pribadi menyebabkan kemacetan parah yang merugikan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan<sup>1</sup>. Dalam konteks hubungan internasional, tantangan ini tidak lagi dapat diselesaikan secara unilateral oleh negara berkembang, melainkan membutuhkan dukungan dari aktor global melalui skema kerja sama pembangunan. Kerja sama internasional dalam bidang infrastruktur tidak hanya mencerminkan solidaritas antarnegara, tetapi juga menjadi bagian dari praktik diplomasi pembangunan (*development diplomacy*) dan mekanisme tata kelola global (*global governance*) yang makin menguat di abad ke-21<sup>2</sup>.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) untuk mengembangkan proyek MRT Jakarta sebagai sistem transportasi publik yang modern, efisien, dan terintegrasi. Kerja sama ini bukanlah bentuk kolaborasi yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari fase sebelumnya

---

<sup>1</sup> Dina Karina, "Jokowi Sebut Kemacetan di Jabodetabek dan Bandung Bikin Rugi Hampir Rp100 T per Tahun," *Kompas TV*, 10 Agustus 2023.

<sup>2</sup> Thomas G. Weiss dan Rorden Wilkinson, *International Organization and Global Governance* (Routledge, 2014).

yang telah sukses dibangun dan dioperasikan sejak tahun 2019. JICA telah berperan penting tidak hanya sebagai lembaga pemberi bantuan pembangunan melalui skema *Official Development Assistance (ODA)*, tetapi juga sebagai mitra institusional yang terlibat dalam perencanaan teknis, pengawasan proyek, dan pengembangan kapasitas kelembagaan lokal<sup>3</sup>.

Keberhasilan fase pertama ini menjadi landasan penting bagi fase lanjutan proyek MRT Jakarta yang dimulai pada tahun 2022. Proyek Fase 2 yang mencakup rute Bundaran HI–Kota dan selanjutnya menuju Ancol, dirancang tidak hanya untuk memperluas jangkauan layanan, tetapi juga untuk memperkuat integrasi sistem transportasi publik secara menyeluruh di wilayah Jakarta. Kerja sama lanjutan ini mencerminkan kesinambungan dari pembangunan infrastruktur yang telah terbentuk antara Indonesia dan Jepang, serta menguji efektivitas institusi kerja sama dalam menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks, baik secara teknis maupun kelembagaan. Dengan mempertimbangkan bahwa proyek MRT Jakarta Fase 2 dilaksanakan dalam periode 2022–2024, maka penelitian ini berfokus pada bagaimana dinamika koordinasi dan pelaksanaan kerja sama tersebut berlangsung selama fase lanjutan ini, serta sejauh mana pola kerja sama yang telah terbentuk sebelumnya tetap efektif dalam menghadapi kondisi yang berbeda.

Dalam proyek MRT Jakarta Fase 2, koordinasi antar lembaga seperti, Pemprov DKI Jakarta dan JICA dalam proyek MRT Jakarta, menciptakan struktur kerja sama yang kompleks. Keterlambatan pembebasan lahan, perbedaan prosedur birokrasi, serta tantangan dalam harmonisasi regulasi menunjukkan bahwa efektivitas proyek tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan finansial, tetapi juga pada sejauh mana koordinasi institusional dapat berlangsung secara efektif. Kondisi ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan kerja sama di masa lalu tidak serta-merta menjamin efektivitas di masa kini, terutama ketika proyek melibatkan ruang sosial yang lebih kompleks dan tekanan pembangunan yang semakin tinggi. Di sinilah pentingnya mengkaji ulang efektivitas kerja sama internasional dari sudut

---

<sup>3</sup> *JICA Indonesia Office. The Role of JICA in MRT Jakarta Project: Supporting Infrastructure Development in Southeast Asia.* JICA, 2022.

pandang institusional, untuk memahami bagaimana suatu pola kolaborasi yang telah berjalan dapat bertahan dan berfungsi di tengah perubahan kondisi objektif dan dinamika internal yang berbeda.

Sebagaimana dikemukakan Keohane dalam kerangka neoliberal institusionalisme, institusi internasional memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan transparansi dalam hubungan antar aktor yang tidak setara secara kekuatan<sup>4</sup>. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas kerja sama antara *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan proyek MRT Jakarta Fase 2 periode 2022–2024. Fokus analisis diarahkan pada tiga indikator utama yang diadaptasi dari teori Keohane, yaitu: penyediaan informasi (*providing information*), penjaminan komitmen (*making commitments credible*), dan pengurangan biaya transaksi (*reducing transaction costs*). Ketiga aspek ini digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami bagaimana bentuk koordinasi, mekanisme institusional serta relasi antara aktor internasional dan domestik bekerja dalam praktik kerja sama pembangunan yang berlangsung dalam konteks proyek infrastruktur strategis di kawasan perkotaan.

## **2. PEMBAHASAN**

Kerja sama antara *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proyek MRT Jakarta Fase 2 (2022–2024) mencerminkan kesinambungan dari bentuk kolaborasi pembangunan yang telah terjalin dalam fase sebelumnya. Hubungan ini telah membentuk pola interaksi institusional yang relatif mapan dan berlangsung dalam jangka panjang. Namun demikian, efektivitas kerja sama dalam fase lanjutan perlu dikaji secara lebih mendalam, terutama mengingat konteks geografis, sosial, dan teknis yang lebih kompleks dibandingkan dengan fase awal. Fase kedua yang berlangsung sejak tahun 2022 hingga saat ini merupakan bentuk kesinambungan kerja sama yang telah terbangun antara Indonesia dan

---

<sup>4</sup> Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (Princeton: Princeton University Press, 1984).

Jepang, dan secara institusional memperlihatkan bagaimana hubungan pembangunan internasional dikonsolidasikan melalui mekanisme kolaboratif jangka panjang. Namun demikian, efektivitas kerja sama tersebut tetap perlu dianalisis lebih dalam, terutama untuk memahami bagaimana bentuk koordinasi antar institusi internasional maupun domestik yang berjalan dalam konteks pembangunan infrastruktur yang bersifat kompleks secara teknis dan sosial.

Efektivitas kerja sama internasional sangat bergantung pada peran institusi dalam menyediakan informasi yang transparan, menjamin komitmen antar aktor, dan mengurangi biaya transaksi yang muncul akibat ketidakpastian dan kompleksitas hubungan antar pihak<sup>5</sup>. Dalam hal ini, penyediaan informasi menjadi aspek yang krusial, mengingat banyaknya aktor yang terlibat dan sensitivitas sosial dari wilayah yang menjadi jalur proyek. Mekanisme pertukaran informasi dalam kerja sama ini difasilitasi melalui forum resmi seperti *Joint Coordination Committee* (JCC), penyusunan *Minutes of Discussion* (MoD), serta laporan teknis berkala yang disusun oleh konsultan independen. Pertemuan rutin antar institusi terkait memperlihatkan adanya komitmen terhadap keterbukaan informasi dan koordinasi teknis yang mendalam antara JICA, Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, dan PT MRT Jakarta<sup>6</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan institusi dan forum bersama berperan dalam meminimalkan asimetri informasi, yang merupakan salah satu penyebab inefisiensi dalam kerja sama lintas negara<sup>7</sup>.

Namun demikian, keterbukaan informasi kepada publik masih menjadi persoalan. Beberapa dokumen penting, seperti laporan teknis studi kelayakan dan skema pembiayaan, belum sepenuhnya dipublikasikan. Transparansi kepada masyarakat lokal, yang terdampak langsung oleh pembangunan, masih terbatas pada sosialisasi umum, bukan partisipasi bermakna. Padahal, legitimasi sosial terhadap proyek pembangunan tidak

---

<sup>5</sup> Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (Princeton: Princeton University Press, 1984).

<sup>6</sup> JICA, *Minutes of Discussions: Jakarta MRT East-West Line Project*, 2024.

<sup>7</sup> Andrew Moravcsik, "Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics," *International Organization* 51, no. 4 (1997): 513–553.

hanya ditentukan oleh keberhasilan teknis, tetapi juga oleh sejauh mana publik dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka<sup>8</sup>. Keterbatasan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi informasi antara pemangku kepentingan utama dengan masyarakat umum, yang seharusnya dapat diatasi melalui penguatan kerangka institusional kerja sama.

Aspek kedua yang menjadi perhatian adalah penjaminan komitmen antar aktor. Kerja sama ini dibingkai dalam kontrak formal, termasuk perjanjian pinjaman ODA antara Indonesia dan Jepang serta MoU antara JICA dan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, komitmen pelaksanaan proyek dibagi jelas: pemerintah pusat bertanggung jawab atas kerangka kebijakan dan pembiayaan, sedangkan Pemprov DKI Jakarta memegang peran penting dalam pelaksanaan teknis di lapangan, termasuk pembebasan lahan dan koordinasi antar dinas. Namun, sejumlah hambatan tetap terjadi, terutama dalam hal keterlambatan pembebasan lahan dan pemindahan utilitas di wilayah padat penduduk<sup>9</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara institusional komitmen telah dirancang dengan jelas, kapasitas eksekusi di tingkat lokal belum sepenuhnya optimal. Fragmentasi birokrasi, kepentingan politik lokal, dan keterbatasan koordinasi horizontal antar lembaga daerah menjadi faktor yang melemahkan efektivitas penegakan komitmen tersebut. Kerja sama ini juga dapat dinilai melalui sejauh mana institusi mampu mengurangi biaya transaksi yang muncul selama pelaksanaan proyek. Pengalaman dari fase pertama telah memberikan kerangka kerja yang relatif mapan, mulai dari mekanisme pengadaan, sistem pelaporan, hingga proses pelatihan teknis bagi tenaga kerja lokal. Ini membantu mengurangi beban administratif dan mempercepat proses pelaksanaan di fase kedua. Penggunaan konsultan yang sama, struktur tim pelaksana yang sudah terlatih, serta kelanjutan sistem koordinasi lintas institusi menjadi modal penting dalam menjaga efisiensi pelaksanaan proyek<sup>10</sup>. Namun, biaya transaksi tetap muncul dalam bentuk kompleksitas administratif lintas

---

<sup>8</sup> *Detik*. "Desain Ulang MRT DKI: Tantangan Koordinasi dengan Jepang." *Detik*, 2023.

<sup>9</sup> *Kompas*. "Pembebasan Lahan MRT Jakarta Fase 2 Terkendala Teknis dan Sosial." *Kompas*, 2023.

<sup>10</sup> PT MRT Jakarta, *Laporan Progres Proyek MRT Jakarta Fase 2*, 2023.

sektor, keterlambatan perizinan teknis, dan lemahnya integrasi data antar instansi pemerintah. Hambatan ini menimbulkan inefisiensi dan memperlambat realisasi target proyek, yang semestinya dapat dikurangi dengan pembaruan prosedur dan perbaikan sistem tata kelola koordinasi proyek<sup>11</sup>.

### **3. KESIMPULAN**

Kerja sama antara *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan proyek MRT Jakarta Fase 2 periode 2022–2024 menunjukkan tingkat efektivitas yang relatif tinggi, meskipun tidak lepas dari sejumlah tantangan institusional dan teknis. Melalui mekanisme pertukaran informasi yang terstruktur, komitmen yang dituangkan dalam perjanjian formal, serta pembentukan forum koordinasi lintas lembaga, kerja sama ini mampu mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari teori Neoliberal Institusionalisme.

Penyediaan informasi antar aktor berjalan cukup terbuka dan sistematis melalui forum resmi dan dokumen bersama, meskipun masih terdapat keterbatasan akses informasi kepada publik secara luas. Komitmen kerja sama telah dijaga melalui kontrak yang mengikat secara hukum dan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, meski dihadapkan pada hambatan seperti keterlambatan pembebasan lahan dan fragmentasi birokrasi. Upaya pengurangan biaya transaksi juga tampak melalui pemanfaatan struktur kelembagaan yang sudah terbentuk pada fase sebelumnya, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proyek.

Secara keseluruhan, proyek ini menjadi representasi nyata dari kerja sama pembangunan internasional yang berkelanjutan dan menunjukkan bagaimana institusi internasional dapat memperkuat kapasitas negara berkembang dalam mengelola proyek infrastruktur strategis. Evaluasi terhadap kerja sama ini tidak hanya penting dari sisi capaian teknis, tetapi

---

<sup>11</sup> Badan Kebijakan Transportasi Nasional, “Evaluasi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional,” 2022.

juga dari aspek tata kelola, transparansi, dan adaptabilitas kelembagaan dalam konteks hubungan internasional yang semakin kompleks.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Kebijakan Transportasi Nasional. *Evaluasi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional*. 2022.
- Detik. "Desain Ulang MRT DKI: Tantangan Koordinasi Dengan Jepang." *Detik.Com*, 2023.
- Japan International Cooperation Agency (JICA). *Minutes of Discussions: Jakarta MRT East-West Line Project*. 2024.
- Japan International Cooperation Agency (JICA). *The Role of JICA in MRT Jakarta Project: Supporting Infrastructure*. 2022.
- Karina, Dina. "Jokowi Sebut Kemacetan Di Jabodetabek Dan Bandung Bikin Rugi Hampir Rp100 T per Tahun." *Kompas TV*, 2023.
- Keohane, Robert O. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. 1984.
- Kompas. *Pembebasan Lahan MRT Jakarta Fase 2 Terkendala Teknis Dan Sosial*. 2023.
- Moravcsik, Andrew. "Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics." *International Organization*, vol. 51, no. 4, 1997, pp. 513–53.
- PT. MRT Jakarta. *Laporan Progres Proyek MRT Jakarta Fase 2*. 2023.
- Weiss, Thomas G., and Rorden Wilkinson. *International Organization and Global Governance*. Routledge, 2020, 2014.